

**PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PENERTIBAN IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
PROVINSI JAWA BARAT**

***THE INFLUENCE OF CONTROL ON THE EFFECTIVENESS OF
CONTROLLING UNDERGROUND WATER UTILIZATION BUSINESS
LICENSES IN WEST JAVA PROVINCE.***

Febri Arianto¹

Emi Rachmawati²

^{1,2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

Febriarianto7447@gmail.com

ABSTRACT

The problem with this research is the inefficiency of the approval of underground water exploitation undertakings in the West Java Province. Based on the problem, the researchers formulate the problem as follows: How great is the impact of the control on the effectiveness of the issuance of underground water exploitation permits in the West Java province? In analyzing the problems studied, the author proposes the theory of control of Handoko (2003:359) while the theories of effectiveness of Duncan in Zulkarnain (2012:32). The hypothesis was formulated as follows: "The great impact of control on the effectiveness of licensing underground water exploitation undertakings in the West Java province. The research method used is this descriptive analysis with a quantitative approach. Data sources obtained from primary and secondary data sources. Data-gathering techniques are used by means of observation, interviews, and diffusion. The population consists of Apparatur Branch Service Energy and Mineral Resources Region V Fields of Land Water and Land Water Entrepreneurs in Bandung Prefecture. The test results of the proposed hypothesis show that the control variable has a moderate and significant relationship between the control over the effectiveness of the issuance of underground water exploitation permits in the West Java Province. In addition, other variables that influence the effectiveness are coordination, monitoring and evaluation variables. Thus, the results of this study are empirically tested.

Keywords: *Control, Effectiveness, Underground Water Utilization Business Permit.*

ABSTRAK

Permasalahan pada penelitian ini adalah belum efektifnya penertiban izin usaha pemanfaatan air bawah tanah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Seberapa Besar Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah Provinsi Jawa Barat. Dalam menganalisis masalah yang diteliti, penulis mengajukan teori pengendalian dari Handoko (2003:359) Sedangkan teori efektivitas dari Duncan dalam Zulkarnain (2012:32). Maka hipotesis yang dirumuskan yaitu: "Besarnya Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penertiban Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Unsur populasi terdiri

Aparatur Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Bidang Air Tanah dan Pengusaha Air Tanah di Kabupaten Bandung. Hasil pengujian terhadap hipotesis yang dirumuskan menunjukkan bahwa variabel pengendalian memiliki hubungan yang sedang dan signifikan antara Pengendalian terhadap Efektivitas Penertiban Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, ditemukan variabel lain yang ikut mempengaruhi Efektivitas yaitu variabel koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian hasil penelitian ini teruji secara empirik.

Kata Kunci: Pengendalian, Efektivitas, Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

1. PENDAHULUAN

Upaya Pemerintah setempat untuk turut berkontribusi dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pendayagunaan sumberdaya air meliputi upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil dan berdaya guna. Pengendalian daya rusak air meliputi Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan

kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Air tanah merupakan sumber air tawar yang terbesar yang ada di bumi ini, mencakup 30% dari total air tawar atau 10.5 juta km³. Akhir-akhir ini pemanfaatan air tanah meningkat dengan pesat, bahkan di beberapa tempat tingkat eksploitasinya sudah sampai pada tingkat yang membahayakan. Air tanah pada umumnya dimanfaatkan baik sebagai sumber air bersih, maupun untuk irigasi.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam pengelolaan air tanah terutama di wilayah pemukiman semakin meluas, hal tersebut disebabkan oleh air tanah yang dikelola menjadi kepemilikan pribadi disertai pengelolaan yang dilakukan hanya untuk kepentingan ekonomi pribadi.

Selain itu, masih ada pengguna hak usaha air tanah yang belum

memperpanjang Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah Pasal 39 dijelaskan bahwa: Izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan waktu izin harus memperhatikan: ketersediaan air tanah, kondisi dan lingkungan tujuan pemakaian dan pengusahaan. Pengajuan masa berlaku izin diajukan secara tertulis paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir. Izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin;
- b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin atau ketentuan lainnya;

Pengurusan Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah menjadi suatu hal yang wajib dipenuhi sebab hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang apabila digunakan secara berlebihan atau tidak wajar, hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Namun, semua air tanah tidak bisa digunakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, pengurusan Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah sangat diwajibkan untuk dipenuhi oleh setiap perusahaan yang ingin memanfaatkan sumber air tanah. Selain itu, masih ada pengguna hak usaha air tanah yang belum memperpanjang Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah. Bagi perusahaan yang enggan mengurus surat perizinan ini, maka mereka harus bersiap-siap untuk dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang tertera di dalam undang-undang.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Pengendalian

Menurut Handoko, (2003:359), terdapat empat langkah dalam pengendalian yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja (*establish standard and methods for measuring performance*)

Penetapan standar dan metode untuk mengukur kinerja bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target penjualan dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. Untuk menjamin efektivitas langkah ini, standar tersebut harus dispesifikasi dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan.

- b. Mengukur kinerja (*measure the performance*) Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitif, dengan frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur.
- c. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar (*compare the performance match with the standar*)
- Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali. Oleh karena itu, manajer tidak perlu campur tangan secara aktif dalam organisasi.
- d. Mengambil tindakan perbaikan (*take corrective action*)

Tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajer hanya memantau kinerja dan bukan melaksanakan pengendalian, kecuali apabila manajer mengikuti terus proses tersebut sampai berakhir. Yang perlu mendapat prioritas adalah menentukan cara yang

konstruktif agar kinerja dapat memenuhi standar dan tidak mengidentifikasi kegagalan yang telah terjadi.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini terdapat beberapa pengertian pengendalian menurut para ahli Menurut Hasibuan (2006:245) mengemukakan pendapatnya bahwa, “Pengendalian adalah menentukan standar-standar yang akan digunakan di dalam dasar pengendalian, mengukur pelaksanaan atau hasil yang akan dicapai, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar menentukan penyimpangan jika ada, dan melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana”.

Menurut Terry dikutip oleh Hasibuan (2019:242), “Pengendalian dapat di definisikan sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar”. Sedangkan menurut Strong dikutip oleh Hasibuan (2019:241), Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

2.2 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Supriyono (Supriyono, 2000:29) “Efektivitas merupakan hubungan antara keluarga suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.

Sedangkan menurut Siagian (2001:24) Efektivitas adalah “Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.”

Menurut Duncan dalam Zulkarnain (2012:32) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas yaitu:

a. Pencapaian tujuan

Berbagai Upaya untuk mencapai tujuan haruslah dapat dipandang sebagai suatu proses agar semakin

terjamin dalam pencapaian tujuan akhir. Selanjutnya pentahapan sangat diperlukan, baik dalam arti pentahapan, pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti perodesasinya.

b. Integrasi

Pengukuran terhadap kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

c. Adaptasi

Suatu proses dalam penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu untuk menyesuaikan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam metode penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono 2009:14). Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu

penelitian yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada dalam Pengaruh Pengendalian terhadap Efektivitas Penertiban Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral Wilayah V Provinsi Jawa Barat. Selain itu penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) guna membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka dalam pengumpulan data, peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan

Dengan adanya kedua variabel tersebut, maka dapat ditentukan adanya pengaruh dan kesesuaian antara sebab akibat dari adanya Pengendalian terhadap efektivitas penertiban izin usaha pemanfaatan air bawah tanah, sehingga dengan adanya kajian tersebut dapat menentukan tingkat keberhasilan yang didapat dari adanya variabel penelitian.

Mengacu kepada pendapat di atas maka dapat disimpulkan terhadap penelitian eksplanatif ini apabila dihubungkan dengan adanya variabel penelitian yaitu pada variabel pertama mengenai pengendalian yang dijadikan sebagai sebab dari variabel

kedua yaitu efektivitas sebagai akibatnya. Dari kedua variabel tersebut dapat dirumuskan bahwa adanya hubungan antara pengendalian yang dilakukan oleh Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral Wilayah V Provinsi Jawa Barat yang dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitasnya penertiban izin usaha pemanfaatan air bawah tanah sehingga akan adanya keterkaitan yang dapat memberikan dampak untuk kedua variabel tersebut.

4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta di sebelah barat. Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremai, yang berada di perbatasan antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.

Iklim di Jawa Barat adalah tropis, dengan suhu terendah tercatat yang dapat mencapai 9 °C di Puncak Gunung Pangrango dan tertinggi tercatat yang dapat mencapai 34 °C di Pantai Utara. Curah hujan rata-rata mencapai 2.000mm per tahun di seluruh provinsi. Adapun curah hujan di beberapa tempat di daerah pegunungan berkisar antara 3.000mm sampai 5.000mm per tahun.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sebanyak 46.497.175 jiwa. Mereka tersebar di 26 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %). Penduduk terkecil di Kota Banjar, yaitu sebanyak 192.903 Jiwa (0,43 %).

4.2 Gambaran Umum Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Provinsi Jawa Barat

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah V Sumedang adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi dan mineral di wilayah Sumedang, Jawa Barat. Sejarah profil Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang mencerminkan perkembangan dan evolusi lembaga tersebut dari awal pendiriannya hingga saat ini. Berikut

adalah beberapa poin penting dalam sejarah profil Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang: Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang didirikan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk mengelola sumber daya energi dan mineral yang ada di wilayah Sumedang.

Pembentukan lembaga ini bisa terjadi pada tanggal dan tahun tertentu yang perlu dicatat, Selama perjalanannya, lembaga ini mengalami perubahan dalam nama, tugas, dan fungsi. Ini dapat terjadi sebagai respon terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat atau perubahan dalam kebutuhan dan prioritas wilayah Sumedang, Sejarah profil Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang juga mencakup informasi tentang kepemimpinan di dalam lembaga ini. Siapa yang menjabat sebagai kepala dinas, struktur organisasi, dan bagaimana dinas ini terorganisir adalah faktor penting dalam sejarahnya.

4.3 Visi dan Misi

Adapun Visi Misi dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Visi: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif)

Misi: Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan

tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara; Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara; Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara; Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta

Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

4.4 Uji Validitas dan Reabilitas

4.4.1 Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan pengujian validasi guna mengetahui apakah alat ukur yang dirancang berupa kuesioner dapat berfungsi atau tidak. Pengujian validasi memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pernyataan yang telah diterapkan pada kuesioner dapat mengukur variabel yang telah ada. Nilai r hitung dibandingkan dengan r tabel, apabila r hitung $>$ dari r tabel maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pernyataan di dalam kuesioner dari variabel Pengendalian (X) dan Efektivitas (Y). Hasil uji validitas variabel pengendalian dan efektivitas diolah dengan SPSS yang menunjukkan bahwa hasil uji validitas seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur uji validitas Pengendalian (X) dari seluruh pernyataan titik kritisnya yaitu 0,3. Pada pengujian di atas dinyatakan bahwa seluruh instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur Pengendalian dinyatakan valid

dan layak untuk digunakan karena nilai r hitung $>$ r tabel.

4.4.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan aspek penting dalam penelitian karena merupakan alat pengukur variabel yang akan diuji kebenarannya. Suatu alat ukur harus stabil dan dapat diandalkan agar dapat dipercaya. Hasil uji reabilitas diolah dengan SPSS menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* yang di peroleh pada uji reliabilitas dari seluruh variabel lebih besar dari 0,70 yaitu Pengendalian sebesar 0,933 dan Efektivitas sebesar 0,954 sehingga seluruh instrumen pernyataan yang digunakan dinyatakan reliabel. Hasil pengujian validitas dan pengujian reliabilitas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan jumlah pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel sehingga seluruh instrumen pernyataan layak untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian.

4.5 Analisis Deskriptif Variabel Pengendalian

Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisa pengendalian oleh Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Provinsi Jawa Barat, apakah pengendaliannya sudah dilaksanakan berdasarkan Teori yang dikemukakan oleh Handoko (2003:359), yaitu Menetapkan

standar dan metode untuk mengukur kinerja, dengan dua indikator yaitu SOP Pengendalian Izin Usaha dengan nilai 334 dan adanya target kerja yang harus dicapai dengan nilai 293. Mengukur kinerja, dengan dua indikator yaitu melaksanakan pengawasan atau monitoring ke lapangan dengan nilai 294, dan mengukur target atau capaian pengendalian izin usaha dengan nilai 301, Membandingkan kinerja sesuai dengan standar dengan dua indikator yaitu capaian kerja dibandingkan dengan target dengan nilai 291 dan penilaian kerja yang objektif dengan nilai 289, dan Mengambil tindakan perbaikan dengan dua indikator yaitu melakukan Tindakan korektif dengan nilai 306 dan mengadakan perubahan terhadap standar yang dilakukan sebelumnya dengan nilai 296.

4.6 Analisis Deskriptif Variabel Efektivitas

Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisa pengendalian oleh Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Provinsi Jawa Barat, apakah pengendaliannya sudah dilaksanakan berdasarkan Teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Zulkarnain (2012:32), yaitu Pencapaian tujuan dengan tiga indikator yaitu kepathuan pemegang izin terhadap ketentuan yang tercantum dalam surat izin dengan nilai 288, tertibnya para pelaku usaha pemanfaatan air bawah tanah dalam

memperpanjang izin dengan nilai 292, dan terwujudnya penertiban izin usaha pemanfaatan air bawah tanah dengan nilai 297. Integrasi dengan tiga indikator yaitu, sosialisasi kebijakan izin pemanfaatan air bawah tanah dengan nilai 300, keberlanjutan kepanjangan izin pemanfaatan air bawah tanah dengan nilai 290, dan kemudahan prosedur proses pemanjangan izin usaha pemanfaatan air bawah tanah dengan nilai 295, dan Adaptasi dengan tiga indikator yaitu pemantauan dan evaluasi terhadap Perusahaan yang belum memperpanjang izin dengan nilai 281, realisasi izin usaha sesuai dengan jumlah Perusahaan yang memanfaatkan air bawah tanah dengan nilai 276, dan pemberian sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan nilai 290.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian melalui dimensi Menentukan standar dan metode untuk mengukur kinerja, mengukur kinerja, membandingkan kinerja sesuai dengan standar, dan mengambil tindakan perbaikan. Hal tersebut telah memberikan pengaruh terhadap efektivitas penertiban izin usaha Provinsi Jawa Barat. Pengaruh terhadap efektivitas penertiban izin usaha di

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Provinsi Jawa Barat sebesar 58,9%.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sisanya sebesar 41,1% menunjukkan bahwa efektivitas penertiban izin usaha Provinsi Jawa Barat tidak hanya dipengaruhi oleh variabel pengendalian. Variabel lain yang turut mempengaruhi efektivitas penertiban izin usaha di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Provinsi Jawa Barat adalah variabel koordinasi, pengawasan, dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Pustaka

Drs. R. A. Supriyono, S.U, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE

Handoko, T Hani, 2003 *Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE

Malayu S.P. Hasibuan, 2006 *Op.Cit*, hlm. 244-245

Sondang P. Siagian, 2001, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*", Jakarta: Bumi Aksara

Supriyono, R.A., 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 1, Buku 2*, Yogyakarta: BPFE

B. Pedoman dan Sumber Lain:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang *Pengelolaan Air Tanah*.